





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOHANES TAKA DOSI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 655118

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 888.420.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/381 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah Seluas 1456 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 101.920.000
3. Tanah Seluas 6230 m2 di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 311.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 361.896.500

1. MOBIL, NISSAN CEDRIC 3.2 DIESEL MT/TAKSI Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 31.500.000
2. MOBIL, SUZUKI AIJ31OF GY (4Y.2) M/T / MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 93.400.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 219.996.500
4. MOTOR, VIAR V 15 T M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 36.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.345.916.500

III. HUTANG Rp. 8.412.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.337.504.500



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARTINUS HERMINIGILDUS DHEWA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **908024**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 530.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1397 m2/128 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah Seluas 447 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 875 m2/250 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 23000 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 2590 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 205.300.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.800.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	745.300.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	745.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADRIANI LOMI GA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan
3. NHK : 839060

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.108.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	31.858.000
III. HUTANG	Rp.	195.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-163.142.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIFIN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI
3. NHK : 653042

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	401.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/115.77 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 326.000.000		
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	739.811.929
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.140.811.929
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.140.811.929

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARNOLDUS PRIMAYUS WOGA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
3. NHK : **861393**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 553.553.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 810 m2/63 m2 di KAB / KOTA SIKKA, WARISAN Rp. 353.240.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/81 m2 di KAB / KOTA SIKKA, WARISAN Rp. 200.313.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOBIL, SUZUKI CARRY ST 130 FUTURA Tahun 1991, WARISAN Rp. 23.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 SLD Tahun 2007, WARISAN Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 145.953.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.283.705

F. HARTA LAINNYA Rp. 8.000.000

Sub Total Rp. 823.589.705

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 823.589.705

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARYOS P Y LARO BAY
2. Jabatan : KEPALA SEKSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN
3. NHK : 849529

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 103.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA/SUV Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 254.500.000

III. HUTANG Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 184.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHRISTOFEL TAGA PONO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. NHK : 863566

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 8010 m2/8010 m2 di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 75.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJABG SUPERKF 83/MINIBUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 102.074.390

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 451.074.390

III. HUTANG Rp. 102.074.390

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 349.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DOMINIKUS BILI JOGAR
2. Jabatan : KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
3. NHK : 775219

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 865.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/26 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/25 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.850.000

1. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA IMPRESA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.043.850.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.043.850.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FRANSISKA ROSALINDA DABIDJA KONDI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
3. NHK : 843127

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	72.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2005, HASIL SENDIRI		
Rp. 60.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	104.106.045
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.727.904
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	194.833.949
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	194.833.949

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **THRESE ELDA NDOLU EOH**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **849570**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 70.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HADIAH Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 285.200.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 285.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FLORIANUS NIGA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
3. NHK : **933815**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 688 m2/80 m2 di KAB / KOTA NGADA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SATRIA YOUNG STAR 115 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.021.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	126.021.000
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-173.979.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARMINTO CONELLY ROHY
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN
3. NHK : 842495

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 835.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 451 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 1904 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 3001 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 3670 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 238.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2013, WARISAN Rp. 115.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOTOR, KYMCO BALERO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 96.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.174.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.174.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JANUARIUS GUSTAF LEBA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PELABUHAN
3. NHK : 249787

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	40.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG TOYOTA Tahun 2001, HASIL SENDIRI		
Rp. 40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	47.850.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 47.850.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSEPH V. P. NUSA DOREN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN
3. NHK : 838648

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	108.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
100.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO GT Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	116.500.000
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	66.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSWALDE ELISABETH FREDISU WINDA BERELOY
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN
3. NHK : 910309

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	14.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	14.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.800
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.002.800
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.002.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAKSI EDUARD EDISON KASEH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN
3. NHK : 842742

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/396 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000

1. MOTOR, SUPRA X 125 HONDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, REVO HONDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 616.015.000

III. HUTANG Rp. 58.212.736

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 557.802.264

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Maria Wilfrida Basilika
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 681435

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/105 m2 di KAB / KOTA SIKKA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOBIL, KIJANG PICK UP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.150.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 534.450.000

III. HUTANG Rp. 320.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 214.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARTINUS HENDRIKUS DA GOMEZ**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN**
3. NHK : **838480**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 36.670.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 26.670.000
2. Tanah Seluas 506 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.200.000

1. MOTOR, HONDA VARIO ESP 125 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.900.000
2. MOTOR, HONDA NEW VARIO 125 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.400.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G / MICRO/MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 94.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.497.200

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 171.467.200

III. HUTANG Rp. 347.721.171

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -176.253.971

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MEFFIBOSET E. I. B. EOH
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 878515

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.900.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/169 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.900.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	401.000.000
III. HUTANG	Rp.	200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	201.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NGGALA HAMBA NDIMA**
2. Jabatan : **KEPALA UNIT**
3. NHK : **857569**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	420.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/144 m2 di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, WARISAN Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA SUMBA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	80.000.000
1. MOTOR, HONDA E1F02N11M2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, KIJANG MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.691.200
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	546.941.200
III. HUTANG	Rp.	104.338.937
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	442.602.263

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PIUS SAJU
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. NHK : 918961

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 490.100.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 490.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONALDO ENGELBERT
2. Jabatan : KEPALA SEKSI BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PELAYARAN
3. NHK : 852684

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG GRAND LUX Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 588.500.000

III. HUTANG Rp. 263.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 325.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SEMUEL PATIUNG**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
3. NHK : **849012**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 452.115.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 478 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 48.854.000
2. Tanah Seluas 2.623 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.821.000
3. Tanah Seluas 2.5 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 282.440.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 134.100.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
2. MOTOR, HONDA CS12AIRR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA DIP02N13L2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 69.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 100.613.852**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 756.328.852**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 756.328.852**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SERLINDA LURUK BERE NIGI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. NHK : 842739

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	27.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO MPX 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI		
Rp. 10.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO MPX 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI		
Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	55.000.000
III. HUTANG	Rp.	164.422.987
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-109.422.987

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : URSULA BESNA NORHENY SENARU
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 838992

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 32.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m2/108 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX155 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.112.384

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 110.112.384

III. HUTANG Rp. 1.320.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 108.792.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIUS DEMU
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 838700

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 337.911.000

1. Tanah Seluas 317 m2 di KAB / KOTA SIKKA, HASIL SENDIRI Rp. 222.534.000
2. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA KOTA MAUMERE, WARISAN Rp. 88.350.000
3. Bangunan Seluas 63 m2 di KAB / KOTA KOTA MAUMERE, HASIL SENDIRI Rp. 27.027.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 39.700.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.900.000
2. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 18.600.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.140.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 60.050.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 477.801.000

III. HUTANG Rp. 477.940.592

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -139.592

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.